



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja secara signifikan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.393.565.924.000,00 bertambah sejumlah Rp. 424.404.999.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.817.970.923.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 2.256.065.924.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 265.243.704.322,00</u>

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.521.309.628.322,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 2.393.565.924.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 424.404.999.000,00</u>

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.817.970.923.000,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 150.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 168.336.162.777,00</u>

Surplus /(Defisit) setelah perubahan Rp. 318.336.162.777,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 12.500.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 9.174.868.099,00</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.674.868.099,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1. Semula Rp. 123.352.658.000,00
- 2. Bertambah Rp. 43.661.000.185,73

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 167.013.658.185,73

b. Dana Perimbangan

- 1. Semula Rp. 1.413.546.494.000,00
- 2. Bertambah Rp. 58.616.204.028,00

Jumlah dana perimbangan
setelah perubahan Rp. 1.472.162.698.028,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1. Semula Rp. 719.166.772.000,00
- 2. Bertambah Rp. 162.966.500.108,27

Jumlah lain-lain pendapatan daerah-
yang sah setelah perubahan Rp. 882.133.272.108,27

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- 1. Semula Rp. 30.000.000.000,00
- 2. Bertambah Rp. 12.000.000.000,00

Jumlah pajak daerah
Setelah perubahan Rp. 42.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- 1. Semula Rp. 8.674.500.000,00
- 2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 8.674.500.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

- 1. Semula Rp. 6.500.000.000,00
- 2. Bertambah Rp. 265.981.700,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan-
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 6.765.981.700,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- 1. Semula Rp. 78.178.158.000,00
- 2. Bertambah Rp. 31.395.018.485,73

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah -
setelah perubahan Rp. 109.573.176.485,73

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

- 1. Semula Rp. 807.730.028.000,00
- 2. Bertambah Rp. 58.616.204.028,00

Jumlah dana bagi hasil -
pajak/bukan pajak Rp. 866.346.232.028,00

- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 410.681.304.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah dana alokasi umum -
setelah perubahan Rp. 410.681.304.000,00
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 195.135.162.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah dana alokasi khusus -
setelah perubahan Rp. 195.135.162.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 37.418.469.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 166.469.000,00)</u> |
- Jumlah pendapatan hibah -
setelah perubahan Rp. 37.252.000.000,00
- b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 232.522.760.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 56.032.969.108,27</u> |
- Jumlah pendapatan bagi hasil pajak -
setelah perubahan Rp. 288.555.729.108,27
- c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 122.624.619.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah dana penyesuaian setelah -
perubahan Rp. 122.624.619.000,00
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 326.600.924.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 107.100.000.000,00</u> |
- Jumlah bantuan keuangan setelah -
perubahan Rp. 433.700.924.000,00
- e. Pendapatan lainnya
- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah pendapatan lainnya setelah -
Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 995.747.236.513,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 58.940.134.737,00</u> |
- Jumlah belanja tidak langsung setelah -
perubahan Rp. 1.054.687.371.250,00

b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp	1.397.818.687.487,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>365.464.864.263,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah - perubahan			Rp. 1.763.283.551.750,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	672.840.956.786,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>58.335.490.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah - perubahan			Rp. 731.176.446.786,00
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja hibah			
1. Semula	Rp.	44.797.100.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>549.400.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		45.346.500.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp.	4.475.000.0000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		4.475.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1. Semula	Rp	3.867.450.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>1.200.000.000,00</u>	
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp.		5.067.450.000,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1. Semula	Rp.	263.766.729.727,00	
2. Berkurang	(Rp.)	<u>1.144.755.263,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan Kabupaten - setelah perubahan			Rp. 262.621.974.464,00
h. Belanja tidak terduga			
1. Semula	Rp	6.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah - perubahan	Rp.		6.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja;

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp. 154.186.949.792,00
2. Bertambah	<u>Rp. 19.727.483.583,61</u>

Jumlah belanja pegawai setelah –
perubahan Rp. 173.914.433.375,61

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp. 542.370.840.768,00
2. Bertambah	<u>Rp. 141.586.122.601,22</u>

Jumlah barang dan jasa –
setelah perubahan Rp. 683.956.963.369,22

c. Belanja modal

1. Semula	Rp. 701.260.896.927,00
2. Bertambah	<u>Rp. 204.151.258.078,17</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 905.412.155.005,17

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 150.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 168.336.162.777,00</u>

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 318.336.162.777,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 12.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 9.174.868.099,00</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 21.674.868.099,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp. 150.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 168.336.162.777,00</u>

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya -
Setelah perubahan Rp. 318.336.162.777,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah -
setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian – pinjaman setelah perubahan		Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah - perubahan		Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah - perubahan		Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal setelah – perubahan		Rp. 0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pembayaran pokok utang setelah perubahan - sejumlah		Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman Daerah setelah - perubahan		Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA

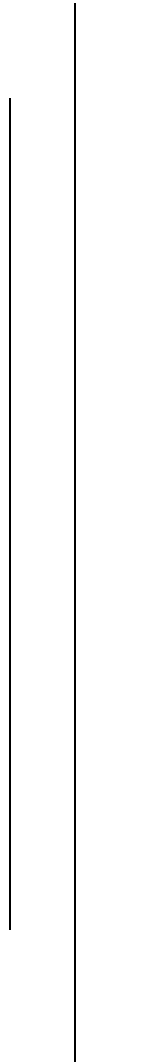
NIP. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR : 66/9/2019



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019**